

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Bencana alam bisa dilihat dari beberapa perspektif; yaitu pertama, bencana alam yang terjadi karena faktor alam, seperti gempa bumi dan erupsi gunung berapi. Bencana alam seperti ini tidak bisa dihindari oleh manusia, namun bukan berarti tidak ada yang bisa dilakukan oleh manusia. Kemajuan teknologi telah menjadikan manusia semakin tanggap terhadap bencana alam yang terjadi, dimana bencana alam dapat diprediksi dan diantisipasi (Junaedi dan Sukmono, 2017: 3).

Dalam penanganan bencana Indonesia, yang berperan penting dalam perumusan dan penetapan kebijakan bencana adalah Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada tingkatan Nasional dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tingkatan Provinsi dan Kabupaten. Lembaga ini dituntut bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien, dan harus melaksanakan Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Namun, dalam penanganan bencana di Indonesia ternyata masih menyisakan banyak permasalahan terutama dalam manajemen informasi. Dari aspek kecepatan, ketepatan, keakuratan – keandalan, aspek informasi menjadi problematika BNPB ini sendiri, terutama ketika berbicara mengenai kesimpangsiuran informasi, berbagai tindakan yang tidak tepat sasaran seperti logistik yang tidak merata, keterpaduan antar sektor dalam penanganan bencana atau ketumpang tindihan masih

banyak terjadi. Di sisi lain, masyarakat masih banyak yang belum mengerti terkait penetapan status bencana, tingkat bencana, dan bagaimana manajemen informasi disalurkan dari BNPB ke masyarakat luas. Hal ini membuat banyak polemik di masyarakat yang saat ini sudah terkungkung dalam era disrupsi yang menyebabkan masifnya penyebaran informasi.

Melalui penerapan Komunikasi Bencana pulalah yang bisa mengurangi atau meminimalisir kerugian akibat bencana alam. Inilah yang harus bisa juga dikembangkan di Indonesia, mengingat negara kita merupakan negara kepulauan dimana gempa, tsunami, dan potensi meletusnya gunung berapi merupakan sebuah ancaman bencana, yaitu meningkatkan peran teknologi informasi dalam memberikan informasi lebih awal tentang potensi terjadinya bencana alam di daerah tertentu.

Manajemen komunikasi memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatasi masalah bencana dan juga untuk mencegah sekaligus mengurangi dampak bencana. Manajemen komunikasi yang dimaksud yakni pengaturan penanggulangan masalah bencana baik pra (peringatan dini) hingga pasca bencana yang melibatkan proses komunikasi, koordinasi antara masyarakat dan pemerintah. Komunikasi dan koordinasi penanggulangan bencana sangat diperlukan untuk memperoleh tujuan yaitu agar penanganan korban bencana berjalan secara efektif dan efisien. Ekeftif berarti tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

Penelitian ini mengambil studi kasus pada Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kabupaten Bantul merupakan wilayah yang memiliki potensi bencana alam yang tergolong dalam kategori sangat tinggi (BNPB, 2011). Tingginya potensi bencana alam di Kabupaten Bantul yang sebagian wilayahnya merupakan wilayah Pesisir Selatan tersebut disebabkan karena; (1) wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Bantul merupakan jalur penujaman antara lempeng Eurasia dan Indo-Australia; (2) memiliki struktur morfologi yang landai dan tersusun dari beberapa lapis lempeng; (4) pada dasar lautnya terdapat banyak gunung berapi aktif; (5) terletak pada lintasan patahan/sesar opak yang aktif. Dari beberapa penyebab terjadinya bencana tersebut, bencana alam yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah Pesisir Selatan Kabupaten Bantul yaitu; gempa bumi, tsunami, gelombang pasang, abrasi, erosi, serta banjir (BNPB, 2011).

Faktor-faktor ini juga diperkuat oleh pernyataan resmi dari BPBD Kabupaten Bantul yang dinyatakan oleh Bapak Bambang Nugroho, S.H, M.Si selaku kepala Divisi Kesiapsiagaan BPBD Bantul yang penulis wawancarai langsung pada Senin, 13 Januari 2020. Beliau mengatakan:

“Bantul memang menjadi kabupaten paling rawan bencana sekaligus paling banyak punya potensi bencana, Mas. Dibanding semua wilayah di DIY bantul paling sering kena bencana alam, khususnya banjir. Musim hujan seperti ini BPBD khususnya bagian Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) yang bertugas mengelola informasi yang masuk ke BPBD ini.” (Sumber: Wawancara dengan Bambang Nugroho, S.H, M.Si, kepala Divisi Kesiapsiagaan BPBD Bantul, pada 13 Januari 2020 Pukul 09.00 WIB)”

Adapun potensi bencana alam yang terdapat di Bantul antara lain: Gempa bumi, tsunami, longsor, banjir, kebakaran, kekeringan, abrasi, cuaca ekstrim dan wabah penyakit.

Dalam Kebencanaan, pengaturan manajemen komunikasi dan informasi menjadi penting untuk membangun koordinasi secara intens dengan masyarakat. Dalam hal ini, manajemen komunikasi bencana di Kabupaten Bantul adalah tugas BPBD Kabupaten Bantul, sebagaimana tertuang dalam Pasal 48 poin a Undang-Undang No. 24 tahun 2007. Badan penanggulangan bencana harus melakukan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya. Maksudnya adalah pasca bencana terjadi, pemerintah harus cepat mengidentifikasi cakupan lokasi bencana; jumlah korban; kerusakan prasarana dan sarana; gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan, yang kemudian diinformasikan pada masyarakat umum.

Penyebaran informasi terkait poin-poin di atas penting, hal ini dikarenakan menurut Sneider informasi yang diterima komunikan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan mengurangi ketidakpastian. Pengurangan ketidakpastian dengan menyebarkan informasi secara cepat, mendukung penanganan bencana yang eskalasinya semakin meningkat (Susanto, 2011 dalam Budi (Ed.), 2011:14).

Mengenai gambaran umum komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bantul, beliau juga menceritakan secara umum terkait usaha BPBD

Kabupaten Bantul dalam membangun komunikasi dengan seluruh *stakeholders*.

Beliau mengatakan:

“Terkait sistem penyebaran informasi dan komunikasi, melalui saluran radio kami selalu standby dengan seluruh pihak yang mempunyai keterkaitan dengan kami, seperti Kodim, Polsek, dan juga masyarakat. Untuk masyarakat sendiri, kita mempunyai Call Center di 112 guna mempermudah masyarakat menghubungi Pusdalops BPBD Bantul, Mas. Kita juga bentuk FPRB, itu Forum Pengurangan Resiko Bencana di tiap desa, diisi oleh volunteers. Komunikasi menjadi penting memang, Mas. Agar informasi satu pintu masuknya dari BPBD Bantul, sehingga tidak ada kesimpangsiuran di tengah Masyarakat. Kami juga punya aplikasi siaga bencana itu namanya Paseban 1, Mas. Sekarang sedang kami upgrade menjadi Paseban 2. Fungsinya sebagai pelaporan masyarakat dan informasi logistic pas penanggulangan bencana.”
(Sumber: Wawancara dengan Bambang Nugroho, S.H, M.Si, kepala Divisi Kesiapsiagaan BPBD Bantul, pada 13 Januari 2020 Pukul 09.00 WIB)

Dalam penelitian ini, penulis berfokus pada bencana banjir di Kabupaten Bantul pada Tahun 2019. Pada Bulan Maret 2019 lalu, Banjir menjadi bencana besar yang menerjang Kabupaten Bantul. Dilihat dari dampaknya, di Kabupaten Bantul terdapat dua korban meninggal dunia. Banjir di Kabupaten Bantul menjadi kabupaten terparah terdampak banjir dibanding 2 kabupaten lainnya yaitu Kulon Progo dan Gunungkidul yang juga terdampak banjir. Jumlah warga terdampak keseluruhan untuk seluruh wilayah DIY sebanyak kurang lebih 5.046 jiwa. Dari jumlah tersebut di Kabupaten Bantul terdapat 4.427 korban mengungsi dan 2 orang korban meninggal dunia.

Adapun data wilayah terdampak bencana banjir adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. *Data Wilayah Terdampak Bencana Banjir Kabupaten Bantul pada Maret 2019*

No.	Kecamatan	Desa	Dusun	RT	Objek Dampak
1.	Kasih	Bangunjiwo	Lemahdadi	7	Mesin Cuci
2.	Pajangan	Guwosari	Iroyudan	3	Air Irigasi Meluap Menggenangi Jalan
3.	Pleret	Wonokromo	Jejeran I	4	Rumah
4.	Dlingo	Mangunan	Mangunan	15	Rumah
5.	Dlingo	Mangunan	Mangunan	15	Saluran Irigasi
6.	Imogiri	Wukirsari	Nogosari II	1	Rumah
7.	Imogiri	Wukirsari	Nogosari II	4	Bangket Jalan, Rumah
8.	Imogiri	Wukirsari	Nogosari II	2	Gardu Ronda
9.	Imogiri	Wukirsari	Nogosari II	6	Rumah, Tiang Listrik
10.	Imogiri	Wukirsari	Nogosari II	2	Rumah
11.	Imogiri	Wukirsari	Nogosari II	1	Bangket, Rumah
12.	Imogiri	Wukirsari	Nogosari II	3	Rumah
13.	Imogiri	Wukirsari	Nogosari II	6	Rumah
14.	Imogiri	Wukirsari	Nogosari II	6	Rumah
15.	Imogiri	Wukirsari	Nogosari II	4	Rumah
16.	Imogiri	Wukirsari	Karang Kulon	3	Talud Sungai
17.	Imogiri	Wukirsari	Bendo	8	Bangket Kolam
18.	Imogiri	Wukirsari	Nogosari I	5	Rumah
19.	Imogiri	Karangtengah	Numpukan	7	Rumah
20.	Kretek	Parangtritis	Kretek	1	Lahan Pertanian Bawang Merah
21.	Kretek	Parangtritis	Depok	3	Laguna Depok Tertimbun Lumpur
22.	Imogiri	Selopamioro	Srunggo 2	12	Jembatan
23.	Imogiri	Karangtengah	Mojolegi	2	Rumah
24.	Imogiri	Wukirsari	Manggung	9	Jembatan Darurat
25.	Srandakan	Poncossari	Cangkring	1	Lahan Pertanian
26.	Banguntapan	Ds.Banguntapan	Pelemwulung	1	Rumah

Sumber: Data Pusdalops BPBD Kab. Bantul

Dari data di atas, dipaparkan rincian desa, dusun dan RT yang menjadi titik lokasi bencana banjir dengan dampak adalah rata-rata perumahan warga dan fasilitas umum yang berada di titik bencana. Wilayah terdampak di Kabupaten Bantul

meliputi 14 kecamatan dan 35 desa, dengan rincian 26 desa ada di 10 kecamatan terdampak banjir dan 9 desa di 4 kecamatan terdampak longsor.

Dalam penelitian ini, penulis fokus mengambil studi kasus di Kecamatan Imogiri sebagai kecamatan yang paling banyak terdampak dan paling banyak titik lokasi bencana sebanyak 17 titik yang terbagi di 3 desa dan 7 dusun. Lebih spesifik lagi, penulis menngambil fokus di Desa Imogiri.

BPBD Kabupaten Bantul harus selalu siaga dalam memetakan titik-titik rawan banjir, terutama yang diakibatkan oleh luapan sungai. Memasuki musim hujan di Kabupaten Bantul, untuk mencegah banjir terjadi cukup sulit, namun meminimalisir dampak agar tidak berakibat korban jiwa dan materil harus diupayakan melalui manajemen komunikasi bencana yang baik. Kondisi sungai yang tidak lagi sesuai harapan juga menjadi faktor luapan air yang mengakibatkan banjir terus terjadi jika memasuki musim hujan. Seperti yang diutarakan Kepala BPBD Kabupaten Bantul Dwi Daryanto kepada Antaranews.com:

"Potensi-potensi luapan air sangat tinggi, karena kondisi sungai yang sudah tidak sesuai dengan harapan kita bersama, di kanan kiri banyak tumbuhan yang tidak beraturan yang itu bisa menghambat lajunya air sungai, sehingga luapan-luapan di sekitar pendangkalan pasti akan terjadi.
(Antaranews.com, 4/11/2019)

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui manajemen informasi dan komunikasi yang dijalankan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Kabupaten Bantul di tengah masyarakat era disrupsi informasi. Dalam konteks ini yang disoroti adalah bagaimana BPBD Bantul memajemen informasi kebencanaan dikomunikasikan melalui berbagai saluran komunikasi di waktu tertentu ke dalam sistem sosial masyarakat.

Penelitian terdahulu tentang Komunikasi Bencana pernah dilakukan oleh Adhianty Nurjanah, Aswad Ishak dan Sakir (2019) dengan judul *E-Government Of Sleman Regency Government Public Relations In Disaster Communication Of Merapi Eruption* (Penerapan E-Government oleh Humas Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Komunikasi Bencana saat Erupsi Merapi). Temuan menunjukkan bahwa dalam komunikasi bencana pada saat erupsi Gunung Merapi pada tahun 2010 Pemerintah Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah melaksanakan *e-Government* secara tepat. Partisipasi masyarakat di daerah rawan bencana dalam menyampaikan informasi tentang keadaan situasi bencana sangat membantu bagi pemerintah daerah dalam meminimalkan dampak agar tidak menimbulkan korban yang lebih besar. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan kegiatan komunikasi bencana yang dilakukan oleh bagian Hubungan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Sleman pada 2010. Bagian kehumasan melakukan komunikasi melalui pencarian data dan informasi yang kemudian disebar melalui berbagai saluran komunikasi yang tersedia. Dalam tahap pra-bencana, dilakukan sosialisasi ke masyarakat rawan letusan Gunung Merapi. Pada saat bencana, Humas mengumpulkan berbagai informasi yang kemudian disebar melalui berbagai channel

ke seluruh *stakeholders* dan pos-pos bencana. Dalam menghadapi situasi bencana ini Humas Kabupaten Sleman dan BPBD Sleman menggunakan alat teknologi komunikasi untuk memberikan kemudahan dan kecepatan akses untuk memantau situasi yang terjadi.

Penelitian terdahulu tentang Manajemen Komunikasi Bencana juga pernah ditulis oleh Erwind Saputra (2018) dengan judul jurnal “*Manajemen Komunikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terhadap Bencana Banjir Di Kabupaten Kampar*”. Hasil dari Penelitian ini menyatakan bahwa BPBD Kabupaten Kampar menyusun suatu perencanaan dalam Renja dan Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kampar untuk Tahun 2017 s/d 2022 disusun sebagai wujud dukungan sistem administrasi negara di bidang penanggulangan bencana yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin handal, profesional, efisien, efektif serta tanggap terhadap keadaan dan lingkungan alam. Tujuan penyusunan rencana strategis adalah sebagai umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan sebagai manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. Pada perencanaan ini BPBD Kabupaten Kampar memiliki rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Penelitian tentang komunikasi bencana juga pernah dilakukan oleh Rini Febrianita Candra pada Tahun 2018 dengan judul “*Manajemen Komunikasi Bencana Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus*

Penanggulangan Bencana Siklon Cempaka di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta).

Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa BPBD DIY kurang optimal dalam mengimplementasikan tahapan manajemen komunikasi bencana dalam penanggulangan bencana siklon cempaka. Tidak terencana dengan baiknya penanganan bencana siklon cempaka mengakibatkan BPBD DIY tidak maksimal dalam menangani bencana tersebut. Keterbatasan waktu yang dimiliki untuk memberikan respon membuat beberapa tahapan manajemen komunikasi bencana tidak optimal dilakukan oleh BPBD DIY sehingga bencana siklon cempaka ini justru menjadi krisis bagi organisasi dan masyarakat. Tiap bagian dalam BPBD DIY dan struktur komando tanggap darurat saling bekerja sama untuk melaksanakan penanggulangan bencana yang baik.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu, penelitian yang penulis angkat memfokuskan pada bagaimana cara komunikasi yang dijalankan BPBD Kabupaten Bantul terhadap seluruh *stakeholders* di Kabupaten Bantul terutama masyarakat terdampak bencana pada saat pra (perencanaan) hingga pasca (evaluasi) bencana banjir yang terjadi di Kabupaten Bantul. Penulis hendak melihat bagaimana peran sentral BPBD Kabupaten Bantul dalam mengawal relevansi informasi dan menjalankan komunikasi yang efektif agar seluruh elemen bisa berperan dan bertugas sesuai kooridor masing-masing untuk meminimalisir dampak bencana. Adapun bencana banjir yang penulis angkat adalah bencana yang hampir tiap tahun terjadi di

Kabupaten Bantul sehingga hasil penelitian ini harapannya bisa bermanfaat dan dijadikan referensi untuk meminimalisir dampak banjir jika terjadi lagi.

Diharapkan hasil penelitian ini memberi kontribusi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penanganan bencana apapun di kemudian hari, khususnya dalam bidang pendistribusian informasi pada masa tanggap darurat. Jangan sampai miss communication menyebabkan korban bencana semakin bertambah dan tidak tertangani.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Manajemen Komunikasi Bencana yang diterapkan BPBD Bantul dalam menyebarkan informasi terkait bencana banjir pada Tahun 2019 kepada masyarakat dan *stakeholders* di Kabupaten Bantul?

C. TUJUAN

1. Mendeskripsikan skema komunikasi informasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bantul kepada seluruh masyarakat dan *stakeholders* di Kabupaten Bantul terhadap informasi bencana banjir dan penanggulangannya pada Tahun 2019.
2. Untuk menganalisis saluran komunikasi bencana dalam manajemen informasi dan komunikasi bencana yang dilakukan BPBD Kabupaten Bantul

D. MANFAAT

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat :

- a. Memberikan kontribusi pada kajian strategi komunikasi bencana
- b. Menjadi bahan kajian studi banding dalam rangka penelitian lebih lanjut tentang manajemen komunikasi bencana di daerah lain.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah agar penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi lembaga pemerintah lain dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tentang manajemen komunikasi bencana. Sebab, manajemen bencana merupakan tanggung jawab pemerintah terutama di daerah-daerah dengan tingkat kerawanan bencana yang tinggi.

E. KERANGKA TEORI

1. Komunikasi Bencana

a. Definisi

Definisi komunikasi bencana jika merujuk pada Lestari (dalam Budi, 2011:88), manajemen komunikasi bencana adalah tata cara mengatur penanggulangan bencana yang di dalamnya melibatkan proses komunikasi, koordinasi antara masyarakat, pemerintah, pendonor, dan lembaga swadaya masyarakat.

Komunikasi bencana memiliki peran yang penting dalam kondisi darurat bencana, tidak hanya itu, komunikasi bencana juga diperlukan pada kondisi pra dan pasca bencana. Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana harus senantiasa diberikan informasi dan komunikasi yang intens

agar bisa mempersiapkan diri secara matang untuk menghadapi bencana. Selain mengkomunikasikan informasi yang memadai tentang potensi dan kerawanan bencana di suatu tempat, pelatihan dan internalisasi kebiasaan menghadapi situasi bencana juga harus dilakukan secara berkelanjutan. Namun, adanya informasi berlimpah saja tidak cukup untuk menyadarkan warga atas bahaya bencana yang mengancam.

Menurut Frank Dance (dalam Littlejohn, 2006:7) menyebutkan salah satu aspek yang terpenting dalam komunikasi yang dilakukan adalah konsep reduksi ketidakpastian. Komunikasi itu sendiri muncul karena adanya kebutuhan untuk mengurangi ketidakpastian, supaya dapat bertindak secara efektif demi melindungi atau memperkuat ego yang bersangkutan dalam berinteraksi secara individual maupun kelompok. Oleh karena itu, dalam komunikasi bencana, informasi yang akurat diperlukan oleh masyarakat maupun lembaga swasta yang memiliki kepedulian terhadap korban bencana.

Komunikasi dalam kebencanaan adalah metode terbaik untuk kesuksesan penyelenggaraan mitigasi bencana, persiapan, respon, dan pemulihan situasi pada saat dan pasca bencana. Kemampuan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan tentang bencana kepada publik, pemerintah, media dan pemuka pendapat dapat mengurangi resiko, menyelamatkan kehidupan dan dampak dari bencana (Haddow and Haddow, 2008: xiv).

Komunikasi menjadi kunci dalam penyelenggaraan mitigasi bencana, persiapan, respons, dan pemulihan situasi selama bencana. Kemampuan mengkomunikasikan pesan tentang bencana kepada publik, pemerintah, media, dan *opinion leader* dapat mengurangi risiko, menyelamatkan nyawa dan dampak dari bencana (Haddow, G. D, dan Kims 2008: xiv dalam Adhianty Nurjanah Dkk., 2019)

b. Tujuan dan Prinsip Komunikasi Bencana

Mengutip pernyataan Smith dan Dowell (dalam Purnomo, 2010: 30) menyebutkan bahwa tujuan dari manajemen komunikasi bencana adalah untuk memberikan informasi pada publik, maka komunikasi bencana merupakan salah satu bagian dalam manajemen bencana.

Poin penting dari manajemen komunikasi bencana adalah bagaimana mengelola dan memanfaatkan informasi untuk berkoordinasi antar berbagai pemangku kepentingan (*Stakeholders*) yang dijalankan oleh pemerintah pusat sehingga menghasilkan langkah yang tepat. Hal ini karena pemerintah bertanggung jawab dalam melakukan koordinasi bantuan bencana (Purnomo, 2010: 74). Sehingga pemerintahlah yang harus menjadi insiator koordinasi dan sumber informasi yang mampu dipercaya.

Lebih lanjut Lestari (dalam Budi 2011:99) mengatakan bahwa koordinasi dan komunikasi yang intens penting untuk menghindari

kesimpangsiuran, tumpang tindih, keterlewatan bantuan dan kekeliruan penafsiran kondisi.

Urgensi manajemen informasi dan komunikasi dalam masa darurat atau bencana menurut Barrantes, dkk (2009: 13) dalam modul berjudul *Information management and communication in emergencies and disaster* meliputi:

- 1) *Information is what everyone needs to make decisions* (informasi adalah apa yang dibutuhkan oleh setiap orang untuk membuat keputusan)
- 2) *Information is the main element in the damage and needs assessment process and is the basis for coordination and decision making in emergency situations* (informasi adalah elemen utama dalam proses perhitungan kerusakan dan informasi menjadi basis koordinasi dan dalam membuat keputusan di kondisi darurat)
- 3) *Stakeholders depend on this information to guide their work and to translate their interest and concern into concrete action* (informasi menjadi petunjuk kerja stakeholders dan menerjemahkan ketertarikan mereka untuk merumuskan aksi)
- 4) *It is essential for after-action analysis, evaluation, and lessons learned.* (informasi sangat penting untuk melakukan analisis aksi pasca bencana, evaluasi, dan pembelajaran)
- 5) *Above all, it is necessary for rapid and effective assistance for those affected by a disaster* (dari keseluruhan, informasi penting untuk bantuan cepat dan efektif untuk korban bencana)

6) *One of the major challenges in risk communication is to transform the uncertainty and reactive communication that can occur in the first hours after an emergency/disaster to an organized, proactive and engaging information and communication process with both stakeholders and the public* (tantangan yang paling besar dalam komunikasi krisis adalah mengubah komunikasi yang reaktif dan tidak tentu yang muncul di jam pertama setelah bencana itu terjadi menjadi informasi yang teratur, proaktif, melibatkan informasi dan komunikasi dari stakeholders dan publik).

Menurut Haddow, G. D, dan Kims dalam (Adhianty Nurjanah Dkk., 2019) menyebutkan ada 5 pokok utama dalam membangun komunikasi bencana yang efektif, yaitu:

- 1) *Customer Focus, which is to understand what information is needed by customers in this case the community and volunteers. Communication mechanisms must be established to ensure that information is delivered accurately and accurately.* (Fokus Pelanggan, yaitu memahami informasi apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dalam hal ini masyarakat dan relawan. Mekanisme komunikasi harus ditetapkan untuk memastikan bahwa informasi disampaikan akurat).
- 2) *Leadership Commitment, leaders who play a role in emergency response must be committed to effective communication and actively involved in the communication process.* (Komitmen Kepemimpinan, pemimpin yang berperan dalam tanggap darurat harus berkomitmen untuk komunikasi yang efektif dan terlibat aktif dalam proses komunikasi).

- 3) *Situational Awareness, effective communication is based on the collection, analysis and dissemination of controlled information related to disasters. The principle of effective communication such as transparency and trustworthiness is the key.* (Kesadaran Situasional, komunikasi yang efektif didasarkan pada pengumpulan, analisis, dan penyebaran informasi terkontrol yang terkait dengan bencana. Prinsip komunikasi yang efektif seperti transparansi dan kepercayaan adalah kuncinya).
- 4) *Media partnership, media such as television, newspapers, radio, and others are very important media to convey information appropriately to the public. Collaboration with the media concerns an understanding of the need for information.* (Kemitraan media, media seperti televisi, surat kabar, radio, dan lainnya adalah media yang sangat penting untuk menyampaikan informasi secara tepat kepada publik. Kolaborasi dengan media menyangkut pemahaman akan kebutuhan akan informasi).
- 5) *Disaster Management, must be supported by various approaches both soft power and hard power to reduce the risk of disasters. The soft power approach is to prepare community preparedness through the dissemination and provision of information about disasters. While hard power is an effort to deal with disasters with physical development such as building facilities and infrastructure.* (Penanggulangan Bencana, harus didukung oleh berbagai pendekatan baik *soft power* maupun *hard power* untuk mengurangi risiko bencana. Pendekatan *soft power* adalah untuk mempersiapkan kesiapsiagaan masyarakat melalui penyebaran dan penyediaan informasi tentang bencana).

Sedangkan *hard power* adalah upaya untuk menghadapi bencana dengan pembangunan fisik seperti membangun fasilitas dan infrastruktur).

c. Proses Manajemen Bencana

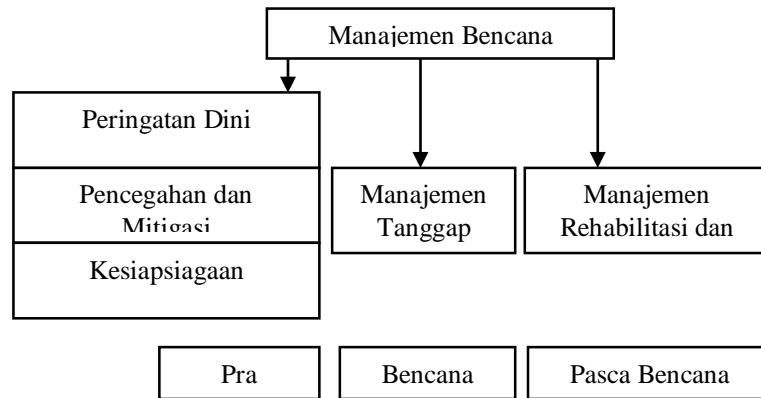
Dalam Undang- Undang No.24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah juga telah mengatur manajemen bencana dan kompetensi komunikasi yang harus diperhatikan di tiap tahap, yaitu:

Pada saat tanggap darurat, menurut pasal 33 huruf b meliputi:

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya
- b. Penentuan status keadaan darurat bencana
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencanap
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan
- f. Pemulihan dengan segera, prasarana dan sarana vital

Berikut adalah gambaran jelas mengenai kegiatan manajemen bencana yang mencoba menjelaskan tiga tahapan dalam proses manajemen bencana mulai dari tahap sebelum bencana, saat bencana dan pasca bencana (Ramli, 2010:31)

Gambar 1.1. Tahapan Manajemen Bencana (Ramli, 2010:3)



Pada Fase Pra Bencana; fase ini meliputi peringatan dini, pencegahan (prevention) dan mitigasi, dan kesiapsiagaan (preparedness). Penjelasannya antara lain:

- 1) Peringatan Dini adalah sistem yang ditujukan untuk memberitahukan akan terjadinya bencana sehingga harus berwaspada. Langkah ini sangat perlu dilakukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian. Serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada elemen masyarakat untuk memberitahukan akan terjadinya bencana di suatu tempat oleh lembaga yang berwenang (UU No. 24 Tahun 2007).
- 2) Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Misalnya; peringatan dan peraturan untuk tidak membuang sampah di sungai.

- 3) Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk meminimalkan dampak yang ditimbulkan oleh bencana. Misalnya membuat bendungan, dam, tanggul sungai, peraturan, tataruang, pelatihan terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Menurut peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana oleh elemen masyarakat.
- 4) Kesiapsiagaan adalah upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian langkah-langkah yang tepat, efektif dan siap siaga. Misalnya; penyiapan sarkom, posko, lokasi pengungsian, peringatan dini yang cepat, tidak membingungkan dan resmi.

Pada Fase saat terjadi bencana, diperlukan langkah-langkah tanggap darurat untuk mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat untuk meminimalisir dampak. Tanggap Darurat adalah upaya yang harus dilakukan segera pada saat kejadian bencana yang bertujuan untuk menanggulangi dampak yang ditimbulkan terutama untuk upaya penyelamatan korban dan dampak harta benda, evakuasi korban, pengungsian dan bantuan darurat logistic berupa pangan, sandang, tempat tinggal, sanitasi, kesehatan dan air bersih.

Pada Fase Pasca Bencana; meliputi pemulihan baik sarana maupun prasarana masyarakat, merehabilitasi dan merekonstruksi kembali pemukiman, tempat ibadah, jalan, listrik dan lain-lain. Adapun tahapan-tahapan pasca bencana adalah melakukan pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi (Ramli, 2010:38).

- 1) Pemulihan adalah proses pemulihan darurat kondisi masyarakat yang terkena dampak bencana, dengan memfungsikan kembali prasarana dan sarana sesuai dengan keadaan semula.
- 2) Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek kehidupan masyarakat.
- 3) Rekonstruksi adalah program jangka panjang dan menengah untuk perbaikan fisik, sosial dan ekonomi guna mengembalikan kehidupan masyarakat pada kondisi yang lebih baik dari sebelumnya.

d. Proses Komunikasi Bencana

Menurut Shaw dan Gupta (dalam Sharma, 2009: 57) bahwa aspek komunikasi dalam manajemen bencana memainkan peran penting. Dalam siklus manajemen bencana, aspek komunikasi juga diperlukan. Pada proses komunikasi bencana, penulis merujuk kepada Disaster Management Cycle yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.2. Disaster Management Cycle



(Sumber: KHAN. (2008))

Dari diagram di atas, dapat dilihat dalam beberapa tahapan, yaitu:

- 1) **Mitigasi**, mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana. Mitigasi bersifat jangka panjang dan berkelanjutan. Maka dalam mitigasi sangat diperlukan aspek komunikasi di dalamnya untuk memberikan pemahaman dan pemantauan situasi risiko bencana kepada masyarakat. Selain itu, komunikasi kebencanaan pada tahap mitigasi juga diperlukan untuk menarik dan melibatkan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- 2) **Persiapan (Preparation)**, aspek komunikasi yang dilakukan berkaitan dengan memberikan informasi yang akurat, koordinasi dan aspek kerja sama, terutama kepada masyarakat yang rentan dan berpeluang terdampak terhadap peristiwa bencana. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah kegiatan pencegahan dan pengurangan risiko melalui

komunikasi yang intens dan efektif seperti kesiapan menghadapi kemungkinan bencana, penyebaran peringatan dini.

- 3) **Response (Ketika bencana terjadi)**, komunikasi, informasi, kolaborasi dan koordinasi menjadi kunci dalam keberhasilan manajemen bencana. Berbagai kegiatan yang dapat dilakukan adalah respon cepat, pemberian bantuan, mobilisasi pencarian & penyelamatan, penilaian kerusakan.
- 4) **Recovery (pascabencana)**, aspek komunikasi juga diperlukan selama rekonstruksi dan pemulihan setelah situasi bencana untuk memulihkan masyarakat terdampak dalam hal psikologis dan memulihkan berbagai hal lain yang terdampak seperti infrastruktur, fasilitas umum, dan lainnya.

e. Media Komunikasi Bencana

Pergerakan arus informasi semakin deras sejalan dengan perkembangan teknologi informasi. Namun demikian, alat komunikasi yang dibutuhkan akan berbeda tergantung karakteristik spasial dan sosial. Media komunikasi merupakan alat yang digunakan untuk menyalurkan informasi kepada masyarakat. Beberapa media komunikasi antara lain saluran internet, televisi, saluran radio, media massa, Handphone (HP), Layer dan lain sebagainya.

Dalam kondisi darurat kebencanaan, media komunikasi sangat berpengaruh pada proses penanganan krisis bencana. Reynold (2002: 135) dalam *Module Crisis and Emergency Risk Communication* menyatakan bahwa:

In an emergency, print information must move electronically to the media or be

given as handouts to media at the site of the incident. If it's important enough to put down on paper (the information will remain current for at least a 12-hour cycle), get it done! (dalam keadaan darurat, informasi cetak harus bergerak secara elektronik ke media atau diberikan sebagai *hand out* ke media yang berada di lokasi kejadian. Jika cukup penting untuk diletakkan diatas kertas {informasi harus tetap berjalan selama setidaknya satu siklus 12 jam, selesaikan).

Artinya, media komunikasi yang lebih tepat dan efektif untuk digunakan dalam mengkomunikasikan informasi bencana adalah media komunikasi elektronik. Maksudnya adalah untuk memastikan pesan terus beredar, meluas tanpa henti mengingat perkembangan elektronik begitu pesat dan dengan mudah menjangkau hingga ke akar rumput masyarakat.

Media komunikasi bencana sangat penting dijalankan secara efektif dan tepat sasaran antar *stakeholders* dalam melakukan gerakan dan tindakan untuk meminimalisir dampak korban dan potensi korban bencana. Haddow

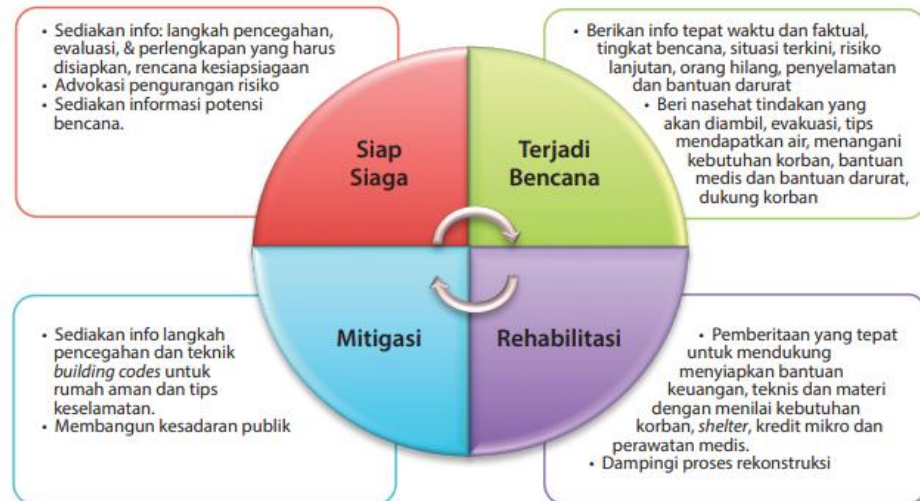
(2009:52) menyebutkan tentang pentingnya fokus pada target khalayak, artinya memahami karakteristik khalayak untuk memastikan pesan dan media untuk isu kebencanaan bisa mendorong ke tindakan dan perilaku mitigasi bencana.

f. Peran Media Massa dalam Penanggulangan Bencana

Media massa berperan penting dalam penanggulangan bencana karena sifatnya yang massal dan terbukti efektif. *Seeds Asia* mempublikasikan bahwa media memiliki peran besar untuk memberitakan bencana dalam tiap tahapan penanggulangan bencana. Media massa memiliki peran ketika kondisi siap siaga untuk mengantisipasi bencana. Peran yang bisa dijalankan adalah menyediakan informasi langkah pencegahan, evaluasi, dan perlengkapan yang harus disiapkan dan rencana kesiapsiagaan. Media juga perlu mengadvokasi pengurangan risiko dan menyediakan informasi yang tepat tentang potensi bencana. Informasi yang tepat melalui media massa tentang pencegahan bencana bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. (Sutopo Purwo, 2019:166)

Selain itu, penyebaran informasi yang tepat akan berguna untuk membantu mengurangi resiko bencana dan pengurangan dampak bagi korban yang terancam bencana. Berikut adalah peran media massa dalam tiap proses penanggulangan bencana:

Gambar 1.3. Peran Media Massa dalam Penanggulangan Bencana



Sumber: (Sutopo Purwo, 2019:166)

- 1) Ketika terjadi bencana, media massa mempunyai peran untuk menyebarkan informasi yang aktual dan faktual. Selain itu, masyarakat berhak tahu tentang seberapa tingkat bencana, bagaimana kondisi dan situasi terkini, bagaimana risiko setelahnya, jumlah korban, penyelamatan dan bantuan darurat. Media juga berperan untuk memberi nasehat tentang tindakan yang akan diambil, bagaimana proses evakuasi, menangani kebutuhan korban, bantuan medis, serta mendukung korban dalam hal psikis.
- 2) Pada masa rehabilitasi, Rehabilitasi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan: perbaikan lingkungan daerah bencana; perbaikan prasarana dan sarana umum; pemberian bantuan perbaikan infrastruktur masyarakat; pemulihan sosial psikologis; pelayanan

kesehatan; rekonsiliasi dan resolusi konflik; pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya; pemulihan keamanan dan ketertiban; pemulihan fungsi pemerintahan; dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Pada fase ini media massa melalui pemberitaan yang tepat dapat mendukung menyiapkan bantuan keuangan, teknis dan materi dengan menilai kebutuhan korban, shelter, kredit mikro dan perawatan medis. Selain itu adanya pemberitaan yang tepat juga berguna untuk mengawal setiap proses rekonstruksi yang telah direncanakan oleh seluruh pemangku kepentingan.

- 3) Fase mitigasi adalah sebuah fase di mana dilakukan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembagunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Pada fase mitigasi bencana maka media massa berperan untuk menyediakan informasi langkah pencegahan dan teknik building codes untuk rumah aman dan tips keselamatan. Selain itu juga dapat memberikan informasi dan pemberitaan multiformat (news, audio, video) dalam bentuk *hard news* dan *soft news* untuk membangun kesadaran publik terhadap bencana.
- 4) Pada fase siap siaga, komunikasi terkait advokasi pengurangan risiko kebencanaan harus intens diberikan kepada masyarakat. kevalidan informasi sangat dibutuhkan dalam fase ini diantaranya informasi

langkah pencegahan, evaluasi, dan persiapan alat perlengkapan serta titik potensi bencana yang dikemas melalui media masing-masing.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Manajemen Komunikasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul pada bencana banjir Bantul 2019 menggunakan jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian ini berusaha tidak hanya menggambarkan fenomena yang ada, melainkan juga mengungkap dan memahami sesuatu dibalik fenomena komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bantul. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis melalui pendekatan kualitatif (Yusuf 2014:3290).

Metode yang digunakan adalah studi kasus. Bungin (2012:19) menjelaskan bahwa studi kasus merupakan penelitian yang terinci tentang seseorang (individu) maupun suatu unit sosial selama kurun waktu tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan studi kasus bencana alam banjir Kabupaten Bantul di Tahun 2019.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul yang beralamat di Jetis, Palbapang, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah melalui data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber pertama. Adapun dalam penelitian adalah pihak Divisi Kesiapsiagaan Kabupaten Bantul dan Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) BPBD Kabupaten Bantul.

Adapun Data sekunder adalah data-data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak-pihak lain berupa website, jurnal dan buku yang telah diverifikasi sehingga data yang dikumpulkan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

4. Teknik Pengambilan Data

Pengambilan data merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan dalam melaksanakan penelitian. Dalam prosesnya terdapat beberapa teknik, Teknik di bawah ini dilakukan dengan triangulasi pengumpulan data yang bertujuan agar

peneliti mendapatkan data yang lengkap dan tepat untuk tujuan penelitian ini, berikut teknik dari pengambilan data yang digunakan:

a. Wawancara Mendalam (*Indeep Interview*)

Wawancara mendalam ditujukan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan langsung bertatap muka dengan informan. Kegiatan ini meliputi usaha pengumpulan informasi dengan mengajukan pertanyaan dan dijawab secara lisan. Wawancara ini digunakan untuk proses manajemen komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bantul pada bencana alam banjir 2019.

Pada penelitian peneliti menggunakan petunjuk pada Teknik pengumpulan data wawancara ini dengan kriteria informan sebagai berikut :

- 1) Manajer Pusdalops (Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana) BPBD Kabupaten Bantul sebagai bagian yang berinteraksi langsung dengan pemangku kepentingan.
- 2) Perwakilan masyarakat Kecamatan Imogiri sebagai kecamatan paling terdampak di Banjir Bantul 2019. Diambil dari perwakilan Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Imogiri

Berikut ini kriteria yang dipilih sebagai narasumber atau informan adalah :

- 1) Aka Luk Luk selaku Manajer Pusat Pengendali Operasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul
- 2) Katmiati selaku Sekretaris Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Desa Imogiri

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara untuk mengumpulkan data berupa arsip, majalah, tulisan-tulisan ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan oleh seorang peneliti. Dalam penelitian ini, studi dokumentasi yang digunakan sebagai data tambahan berupa dokumen-dokumen tertulis, foto dari BPBD Kabupaten Bantul.

G. TEKNIK ANALISIS DATA

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data kualitatif. Dalam mengolah dan analisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Metode ini dijalankan dengan mengklasifikasi data yang terkumpul, dirangkai, dan dijelaskan menggunakan kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk mendapatkan kesimpulan, (Moleong, 2007:52). Adapun tujuan dari metode ini adalah untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktor-faktor sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huerman antara lain sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, penyederhanaan data yang ada di lapangan, baik berupa hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasaan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Pada penelitian ini peneliti mereduksi data dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan arsip-arsip resmi BPBD Kabupaten Bantul

b. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah men-*display*-kan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut. Peneliti akan memaparkan secara terbuka bagaimana manajemen komunikasi bencana yang dilakukan BPBD Bantul selama bencana alam banjir bantul 2019.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Penelitian ini berusaha untuk mencari gambaran mengenai proses manajemen komunikasi bencana yang dilakukan BPBD Bantul selama bencana alam banjir bantul 2019.

H. UJI VALIDITAS DATA

Dalam penelitian kualitatif, Peneliti berusaha mendapatkan data yang valid .oleh karena itu, dalam pengumpulan data Peneliti perlu mengadakan validitas agar data yang diperoleh tidak *invalid*. Peneliti menggunakan model triangulasi data. Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi Teori Teknik ini mengandung makna bahwa suatu fakta empiris hasil investigasi divalidasi dengan beberapa teori dan harus memiliki kebenaran dalam teori tersebut. Disini peneliti melakukan langkah membandingkan atau menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang sudah ada.

Sebagai pelengkap apabila data yang diperoleh dari sumber pertama masih belum lengkap maka data yang diperoleh tidak hanya dari satu sumber saja namun dapat diperoleh dari sumber lain yang secara langsung terlibat dengan subjek penelitian. Trianggulasi dengan menggunakan sumber data berarti membandingkan dan mengecek kembali drajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui

waktu dan alat yang berbeda dengan metode kualitatif (Meleong, 2002). Hal tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

I. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mempermudah peneliti dan pembaca dalam memahami penulisan skripsi ini, peneliti membuat rancangan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan disajikan mengenai latar belakang masalah, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai gambaran umum atau profil dari objek penelitian. Penelitian akan diselenggarakan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dan secara khusus pada bagian Divisi Kesiapsiagaan dan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops). Adapun penjelasan dalam bab ini akan berisikan informasi mengenai sejarah, visi dan misi serta penjelasan mengenai BPBD Kabupaten Bantul.

BAB III : PEMBAHASAN

Pada BAB Pembahasan akan dipaparkan berbagai penjelasan mengenai sajian data dan analisis data yang diperoleh dari kumpulan data yang telah dikumpulkan berdasarkan metode penelitian yang telah ditetapkan yakni wawancara dari objek

penelitian. Bab ini akan menjelaskan bagaimana manajemen komunikasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Bantul pada peristiwa banjir Tahun 2019 di Kabupaten Bantul. Hal ini akan dikemas dalam pola sajian data dan analisis data berdasarkan observasi, wawancara dan studi dokumen.

BAB IV : PENUTUP

Pada bagian penutup ini akan membahas secara ringkas mengenai kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan di BPBD Kabupaten Bantul mengenai manajemen komunikasi bencana yang dilakukan secara ringkas dan menyeluruh. Pada bab ini akan dimasukkan beberapa saran dari peneliti sebagai masukan kepada BPBD Kabupaten Bantul berdasarkan temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan